

Pengaruh Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Kantor DPRD Kabupaten Enrekang

Ulfa¹, Abdul Rahman Mus², Subhan^{3*}, Muh. Abduh⁴, Nur Wahyuni⁵
ulfadwiarianikasman@gmail.com¹, abd.rahman@umi.ac.id², subhan.subhan@umi.ac.id^{3*},
muhammad.abduh@umi.ac.id⁴, nurwahyuni.nurwahyuni@umi.ac.id⁵

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia^{2,3*,4,5}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Kantor DPRD Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2022. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data lapangan, penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara membagikan kusioner terhadap objek penelitian. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Kantor DPRD Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk wilayah/daerah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Selain fungsi DPRD sebagai perwakilan suara rakyat, DPRD ini juga menjadi lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas legislasi atau persetujuan terhadap aturan daerah dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Secara umum, lembaga legislatif (DPRD) mempunyai tiga fungsi utama meliputi: fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja eksekutif). Salah satu prinsip keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah adalah akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas disini merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran dan kebijaksanaan tinggi pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Salah satu perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2015: 43). Keuangan daerah menurut Khusaini (2018), Keuangan Daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan

keuangan daerah. Sedangkan menurut Kuswandi (2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Partisipasi merupakan proses dinamis yang sulit diukur dengan menggunakan pengukuran standar (Samah & Aref, 2009). Di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan tidak dapat secara langsung diamati tetapi dapat dilakukan melalui dimensi pengelolaan keuangan yaitu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban (Republik Indonesia, 2014). Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak dapat langsung dilakukan karena pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi kegiatan pengeluaran dan penerimaan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan keuangan dapat terjadi jika pemerintah mengumumkan hasil kegiatan yang dilakukan melalui format yang mudah dipahami masyarakat.

Menurut Taylor (2006), kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada agents untuk melakukan kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principals) memerintah orang lain (agent) untuk melakukan sesuatu atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen (Budi, 2015).

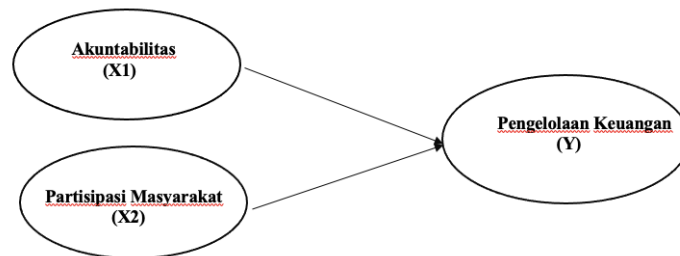
Akuntabilitas, Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (Principal). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015). Akuntabilitas (Accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Waluyo, 2009).

Partisipasi Masyarakat, Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2014). Defenisi dari beberapa sumber diatas membuat penulis mengambil Kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengelolaan Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. Berdasar ketentuan tersebut ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman; (2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) penerimaan daerah; (4) pengeluaran daerah; (5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan (6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan uraian diatas , kerangka konseptual dalam penelitian ini terdapat pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual Teori

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengetahui yang mempengaruhi pengelolaan keuangan, maka dibutuhkan Akuntabilitas (X1), dan Partisipasi Masyarakat (X2). Hasil dari pengukuran tersebut akan mempengaruhi Pengelolaan Keuangan (Y).

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor DPRD Kabupaten Enrekang. Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Tamara (2016) dan Ngakil (2020) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

H2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor DPRD Kabupaten Enrekang. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Mardiasmo, 2014). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dewi (2019) dan Walyati (2020), yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Enrekang. Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini, kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Februari sampai Maret 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kusioner kepada responden, dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel pada Kantor DPRD Kabupaten Enrekang . Terdapat kurang lebih 50 kusiner yang disebar oleh peneliti. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Tabel 1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Pertanyaan	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X11	0,747 > 0,286	Valid
	X12	0,817 > 0,286	Valid
	X13	0,839 > 0,286	Valid
	X14	0,912 > 0,286	Valid
	X15	0,888 > 0,286	Valid
Partisipasi Masyarakat (X2)	X41	0,829 > 0,286	Valid
	X42	0,672 > 0,286	Valid
	X43	0,605 > 0,286	Valid
	X44	0,657 > 0,286	Valid
Pengelolaan Keuangan (Y)	Y1	0,922 > 0,286	Valid
	Y2	0,789 > 0,286	Valid
	Y3	0,808 > 0,286	Valid
	Y4	0,752 > 0,286	Valid
	Y5	0,719 > 0,286	Valid

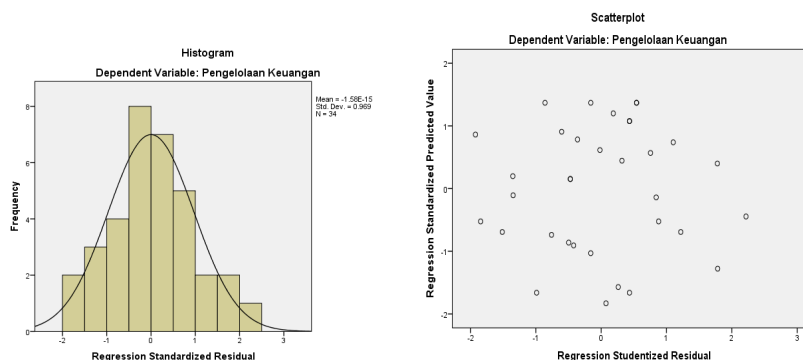
Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	0,856	Baik
Partisipasi masyarakat	0,628	Cukup
Pengelolaan keuangan	0,855	Baik

Sumber Tabel 1 Data Diolah Peneliti (2022)

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam dalam kuesioner adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai Corrected Item – Total > 0,286. Pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu instrument tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi, menunjukkan hasil ukur yang didapatkan semakin terpercaya (reliabel). Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas di tabel 1, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sehingga berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, menunjukkan bahwa instrument memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien alpha > 0,60, jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Cara mendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram.



Gambar 2 Hasil Uji Normalitas dan Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. Akan tetapi grafik histogram ini hasilnya tidak terlalu akurat apalagi ketika jumlah sampel yang digunakan kecil.

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram Scatterplot). Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	1,409	Tidak Multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat	1,409	Tidak Multikolinearitas

Sumber Tabel 2 Data Diolah Peneliti (2022)

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji adanya korelasi antara variabel bebas (independent) pada model regresi. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel. Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk variabel independen yang diajukan oleh peneliti untuk diteliti bebas dari multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat table diatas yang menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen <10, dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan.

Hasil Uji Hipotesis

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent). Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat dari persamaan berikut. Penelitian ini menguji pengaruh kualitas pengelola keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-.857	.457		-1.876	.070
1 Akuntabilitas	.493	.078	.597	6.289	.000
Partisipasi	.683	.155	.419	4.409	.000

Sumber Tabel 3 Data Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel di atas hasil output SPSS di atas maka diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,857 + 0,493X_1 + 0,683X_2$$

Dalam persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan secara rinci:

1. Konstanta (α); Konstanta sebesar $-0,857$. Hal ini berarti jika tidak ada perubahan dari variabel akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, maka pengelolaan keuangan akan menurun sebesar $0,857$. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan tidak baik.
2. Akuntabilitas (X1); Nilai koefisien regresi untuk akuntabilitas sebesar $0,493$. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. Setiap peningkatan akuntabilitas akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan keuangan sebesar $0,493$.
3. Partisipasi Masyarakat (X2); Nilai koefisien regresi untuk partisipasi masyarakat sebesar $0,683$. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. Setiap peningkatan partisipasi masyarakat akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan keuangan sebesar $0,683$.

Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi $0,05$. Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka hipotesis yang diajukan ditolak. Sebaliknya Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka hipotesis yang diajukan diterima.

Tabel 4 Uji Parsial (Uji t)

Varibel	Sig.<a	Keterangan	Hipotesis
Akuntabilitas	$0,000 < 0,05$	Signifikan	Diterima
Partisipasi Masyarakat	$0,000 < 0,05$	Signifikan	Diterima

Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan diketahui bahwa sistem akuntabilitas (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) masing – masing secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang.

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di tabel 5, diketahui bahwa pengelolaan keuangan mampu dijelaskan oleh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sebesar $80,1\%$. Sisanya $19,9\%$ dari pengelolaan keuangan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.895 ^a	.801	.789	.29946

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas merupakan faktor pendukung pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Halim (2014), bahwa akuntabilitas mengharuskan seseorang/badan menjawab dan menerangkan kinerjanya kepada pihak yang meminta dengan demikian maka seseorang/badan tersebut akan mengelola dengan sebaik-baiknya segala sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, termasuk sumberdaya finansial. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas merupakan faktor penentu baik dan tidaknya pengelolaan keuangan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan karena pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang menerapkan akuntabilitas pada semua lini, baik kejujuran dan hukum, manajerial, program dan kebijakan maupun akuntabilitas finansial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Tamara (2016) dan Ngakil (2020) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan, Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Mardiasmo, 2014). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Kim & Schachter (2013), partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu baik dan tidaknya pengelolaan keuangan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan karena masyarakat dilibatkan bukan saja dalam pengambilan keputusan melainkan juga dalam pelaksanaan keputusan – keputusan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dewi (2019) dan Walyati (2020), yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang. 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan simpulan penelitian di atas maka saran yang diberikan dari penelitian adalah sebagai berikut. (1) Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangan perlu memperhatikan dua faktor yaitu akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Hal ini didasarkan pada temuan di mana kedua faktor tersebut memberikan kontribusi pada perbaikan pengelolaan keuangan. (2) Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian sejenis dengan mengambil lokasi berbeda atau menambahkan faktor lainnya seperti transparansi.

Referensi

- Andriani, Matia. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Journal of Accounting, Finance and Auditing. Vo. 1, No. 2 (2019).
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fahri, Syaeful. 2020. *Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada: Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Yayasan Keluarga Pahlawan Negara", Yogyakarta.
- Fauziyah, Miftahul Reza. 2017. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 6, No. 6, Juni 2017.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. 25 Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Jaa, Emilianus. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gunung Turi Kabupaten Manggarai Timur)*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. Vol. 7, No. 1, April 2019.
- Lalolo. K. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Napisah, Lilis Saidah., dan Cecep Taufiqurachman. 2020. *Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol..6, No. 2, Juli 2020.
- Permatasari, Intan., Endah Susilowati dan Oryza Tannar 2021. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening*. JIMEA. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi. Vol. 5, No. 2, 2021.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, Melisa Eka., Fefri Indra Azra., dan Salma Taqwa. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol. 1, No. 3, Seri E, Agustus 2019.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, Fidir. 2019. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM. Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tilaar, H. A. R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Ultafiah, Weny. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulfadzal. 2020. *Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar – Raniry, Banda Aceh.